

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia atau yang lebih sering disingkat BEI merupakan salah satu lembaga di pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif yang mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Peranan Bursa Efek Indonesia dalam membantu perekonomian di Indonesia sangatlah besar. Dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah entitas yang terdaftar di BEI terus meningkat setiap tahunnya. Pada September 2018 tercatat sebanyak 600 perusahaan yang bertransaksi di BEI (*www.idx.co.id*). Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari berbagai jenis perusahaan, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 menyatakan, BUMN terdiri dari tiga bentuk badan usaha yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka), dan Perusahaan Umum (Perum).

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas

saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berumutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia mencatatkan jumlah BUMN yang resmi terdaftar per September 2018 sebanyak 20 emiten. Jenis BUMN tersebut terdiri dari berbagai sektor yaitu farmasi, bank, energi, konstruksi, pertambangan, logam, semen, angkutan, dan telekomunikasi. Sektor konstruksi dan perbankan merupakan sektor yang memiliki emiten terbanyak dari semua sektor yaitu masing-masing 4 perusahaan. Sektor pertambangan sebanyak 3 perusahaan dan disusul oleh sektor farmasi, semen, dan angkutan masing-masing 2 perusahaan. Sektor yang paling sedikit menyumbangkan emiten adalah sektor energi, logam, dan telekomunikasi yaitu masing-masing 1 perusahaan.

Tabel 1.1 Perusahaan BUMN yang *go public* di BEI

No	Nama Emiten	Kode Saham	Sektor
1	PT Indofarma (Persero) Tbk	INAF	Farmasi
2	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	KAEF	
3	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS	Energi
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	Logam
5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI	Konstruksi
6	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PTPP	
7	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA	
8	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WSKT	
9	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	Perbankan
10	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	

(bersambung)

(sambungan)

No	Nama Emiten	Kode Saham	Sektor
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	Perbankan
12	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	Perbankan
13	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM	Pertambangan
14	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA	
15	PT Timah (Persero) Tbk	TINS	
16	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	SMBR	Semen
17	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	
18	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMR	Angkutan
19	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GIAA	
20	PT Telekomunikasi Indonesia	TLKM	Telekomunikasi

Sumber : Situs edukasi saham di BEI (www.sahamok.com)

Pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp103,67 triliun. Dalam rapat Pemerintah Indonesia dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Sekertaris Kementerian BUMN Imam A. Putro menjelaskan bahwa dari target PNBP 2019 sebesar Rp44,7 triliun berasal dari setoran dividen BUMN yang jumlahnya naik 1,9% dibandingkan tahun 2018. Sementara setoran dividen tertinggi BUMN ditargetkan dari BUMN yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia. Jumlahnya sebesar Rp29,03 triliun dan sisanya berasal dari BUMN yang belum *go public* (katadata.co.id, 2018).

Dengan demikian, perusahaan BUMN yang *listing* di BEI dijadikan objek dalam penelitian ini karena melihat dari target PNBP 2019 sebesar 43,12% ditargetkan berasal dari BUMN. Artinya adalah Pemerintah Indonesia memiliki harapan yang besar kepada perusahaan BUMN untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan ini yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dari perusahaan agar dapat memberikan kepuasan bagi para pemegang saham dan dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi. Salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan manajemennya adalah berdasarkan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang suatu perusahaan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai kondisi ekonomi perusahaan dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dan disajikan oleh pihak manajemen dengan maksud sebagai informasi mengenai ukuran kinerja perusahaan dan tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan baik dari pihak internal perusahaan atau pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. (Kasmir, 2014:7).

Sesuai dengan teori keagenan yang sudah dijelaskan bahwa pemegang saham (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan dibanding pemegang saham. Manajemen berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Akan tetapi informasi yang disampaikan manajemen seringkali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi seperti ini dinamakan asimetri informasi (*information asymmetric*). Adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham dapat membuka peluang manajemen laba terutama jika kinerja manajemen diukur berdasarkan laba (Susanti *et al*, 2016).

Menurut Subramanyam dan Wild (2014:108) terdapat tiga jenis manajemen laba. Yang pertama manajer meningkatkan laba (*increasing income*) periode kini. Yang kedua manajer melakukan “mandi besar” (*big bath*) melalui pengurangan laba pada suatu periode. Yang ketiga manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smoothing*). Perataan laba seringkali digunakan oleh manajer untuk mengurangi fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan mengalihkan pendapatan dari tahun yang pendapatannya tinggi ke tahun yang pendapatannya rendah.

Beberapa kasus di Indonesia yang diduga adalah praktik manajemen laba ataupun perataan laba yaitu kasus dari PT. Garuda Indonesia (GIAA). Pada tahun 2015, GIAA diduga melakukan praktik manajemen laba. Jajaran Direksi GIAA memerintahkan Kepala Unit dan Kepala Bagian Akunting untuk melakukan perubahan-perubahan dalam laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Direktur Keuangan menugaskan untuk melakukan identifikasi biaya-biaya non rutin bulan Juni 2015 yang sekiranya dapat ditangguhkan ke bulan Juli atau Agustus 2015 tetapi tidak mengganggu operasional secara signifikan. Selanjutnya, GIAA juga melakukan pengunduran utang dan akan diakui pada bulan Juli atau Agustus 2015. Jajaran Direksi memerintahkan agar perintah ini segera dikerjakan dan yang tidak mengerjakan akan mendapatkan teguran serius. (*energyworld.co.id*, 12 Maret 2016).

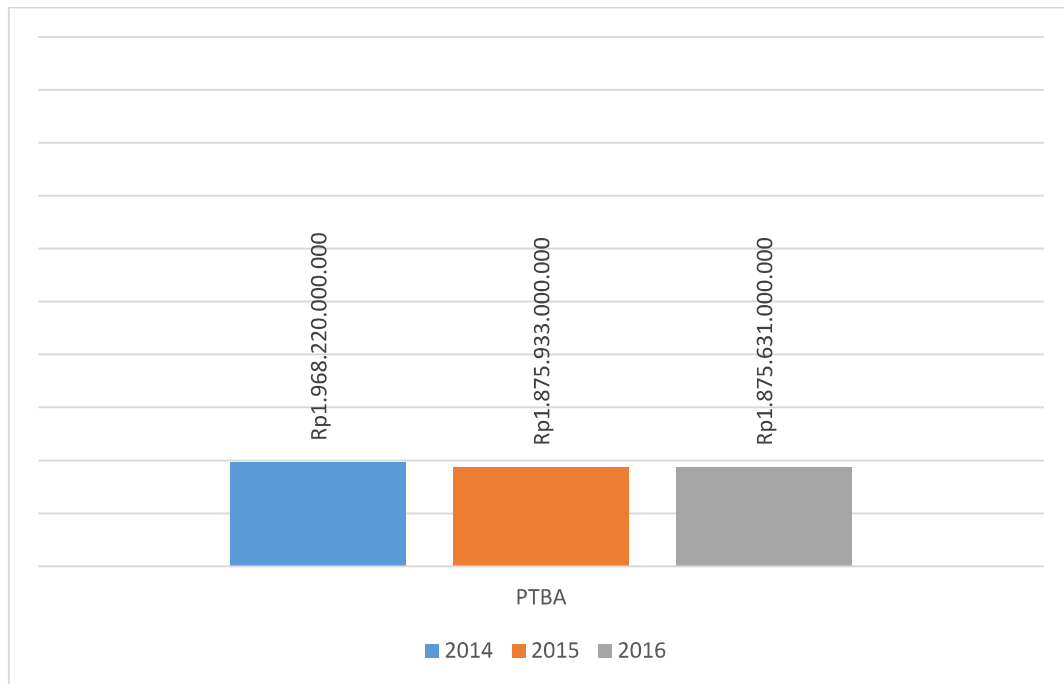
Pada tahun yang sama PT. Timah (TINS) diduga melakukan praktik manajemen laba. TINS memberikan informasi kondisi keuangan perusahaan yang berbeda kepada publik dari yang sebenarnya terjadi. Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi di depan kementerian BUMN. Menurut IKT sejak tahun 2013 Direksi TINS telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat selama tiga tahun sejak 2013. Menurut Ketua Umum IKT Ali Samsuri, direksi TINS melakukan kebohongan dengan memberikan informasi yang berbeda kepada publik tentang kondisi keuangan perusahaan. Salah satu contohnya pada *press release* laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada periode tersebut laba

operasi mengalami kerugian sebesar Rp59 miliar. Sebagai informasi, selain mengalami penurunan laba, TINS juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100 persen dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp2,3 triliun pada tahun 2015. (economy.okezone.com, 27 Januari 2016).

Dalam kasus GIAA, jajaran Direksi sebagai top manajemen meminta bawahannya untuk memanipulasi laporan keuangannya dengan menanggung biaya-biaya yang sekiranya tidak mengganggu operasional ke bulan Juli atau Agustus agar laba pada bulan Juni (Triwulan II) stabil dan laporan keuangan terlihat sehat. Serupa dengan kasus GIAA, TINS juga terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan agar kinerja manajemen dinilai baik oleh para pemegang saham. Pada kenyataannya pada Semester-I 2015 TINS mengalami kerugian laba operasi sebesar Rp59 miliar tetapi Direksi TINS menyampaikan hal yang berbeda melalui *press relase* yang menjelaskan bahwa TINS memiliki kinerja yang baik pada periode Semester-I 2015.

Berdasarkan teori keagenan kedua perusahaan GIAA dan TINS melakukan praktik manajemen laba ataupun perataan laba karena manajemen (*agent*) merasa tidak dapat memenuhi kewajiban yang di berikan oleh pemegang saham (*principal*) sehingga mendorong manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba atau perataan laba. Dalam sebuah perusahaan, jabatan dari seorang Direksi sangat tergantung pada kepuasan para pemegang saham. Apabila pemegang saham merasa tidak puas maka akan dilakukan pergantian Direksi melalui RUPS. Dalam kasus GIAA dan TINS, Direksi berusaha untuk mempertahankan kepercayaan para pemegang saham dan membangun opini bahwa mereka telah bekerja dengan sangat baik.

Fenomena manajemen laba diduga terjadi pada PT. Bukit Asam (PTBA). Berdasarkan data yang diolah, didapatkan fakta bahwa laba PTBA selama tiga tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tingkat fluktuasinya sangat rendah. Berikut adalah grafik dari laba PTBA tahun 2014-2016:



Sumber: Data yang telah diolah, 2018(www.idx.co.id)

Gambar 1.1 Grafik Laba PTBA Tahun 2014-2016

Berdasarkan data pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa laba PT. Bukit Asam (PTBA) pada tahun 2014 menunjukkan angka Rp1,97 triliun dan pada tahun 2015 menunjukkan angka Rp1,87 triliun. Laba PTBA mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 2015 tetapi tidak signifikan yaitu sebesar 4,7%. Pada tahun 2016 laba PTBA masih mengalami penurunan tapi penurunannya sangat kecil yaitu sebesar 0,02%. Dalam waktu tiga tahun, laba PTBA terus menurun akan tetapi tingkat fluktuasinya sangat rendah. Hal ini sangat memungkinkan PTBA melakukan praktik perataan laba dari tahun 2014-2016. Perataan laba bisa dilakukan dengan tidak mengakui sebagian pendapatan atau beban pada periode yang dianggap dapat mempengaruhi fluktuasi laba dan akan diakui pada periode yang sekiranya tidak akan mempengaruhi fluktuasi laba.

Manajemen perusahaan akan sangat mudah melakukan praktik manajemen laba atau perataan laba karena adanya asimetri informasi. Tidak banyaknya informasi yang diketahui oleh pemegang saham atau dengan kata lain manajemen lebih memiliki banyak informasi mengenai kondisi perusahaan membuat para manajemen lebih mudah berbuat sewenang-wenang demi mencapai kepentingan

pribadinya. Ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate Governance* adalah sebuah konsep yang diajukan untuk mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan tercapai (Yadiati dan Mubarok, 2017:89). *Corporate Governance* juga dapat didefinisikan sebagai susunan aturan-aturan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif mengenai hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal sesuai dengan tanggungjawabnya. Penerapan konsep ini sangat baik untuk menjaga stabilitas dari sebuah perusahaan karena dapat meminimalisir adanya konflik dari perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*.

Di Indonesia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib untuk menerapkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan *GCG* pada BUMN dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor: KKEP-117/M/MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *GCG* pada BUMN. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN ini diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi, meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu kinerja sebuah perusahaan, dan mengingat bahwa perusahaan BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam konsep *corporate governance*, struktur kepemilikan dianggap dapat meminimalisir perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba atau perataan laba. Adanya struktur kepemilikan dalam perusahaan akan sangat membantu untuk mengawasi kinerja manajer agar terhindar dari praktek manajemen laba atau perataan laba. Menurut Meiriasari (2017) struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk

mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga kinerja dari suatu perusahaan menjadi lebih baik.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis struktur kepemilikan yang diduga dapat meminimalisir praktik perataan laba antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial. Variabel-variabel tersebut sebelumnya sudah digunakan oleh beberapa penelitian terdahulu. Namun, dalam penelitian-penelitian terdahulu para peneliti menggabungkan antara kepemilikan oleh swasta dan juga oleh pemerintah dalam kepemilikan institusional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kepemilikan institusional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga atau institusi yang dimiliki oleh pihak swasta baik domestik ataupun asing, kemudian kepemilikan pemerintah yang dimaksud adalah lembaga atau institusi yang dimiliki oleh negara atau pemerintah, dan kepemilikan manajerial adalah lembaga atau institusi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional diyakini dapat melakukan suatu mekanisme pengawasan kepada manajemen perusahaan dengan tujuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam perusahaan (Mahariana dan Ramantha, 2014). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan luar negeri, pemerintah, dan kepemilikan institusi lain. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional yang dimaksud adalah lembaga atau institusi yang dimiliki oleh pihak swasta baik domestik ataupun asing. Dengan adanya kepemilikan institusional diyakini bahwa ada pihak yang dapat mengawasi manajemen sehingga dapat meminimalisir tindakan perataan laba. Namun, beberapa penelitian menyatakan pendapat yang berbeda. Ricky (2016) dan Pratiwi dan Damayanthi (2017) menyatakan bahwa adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perataan laba.

Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya mengenai PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dapat dikaitkan dengan teori dari kepemilikan

institusional. Salah satu alasan GIAA melakukan manajemen laba karena adanya upaya manajemen untuk tetap menjaga laba perusahaan agar tidak berfluktuasi sehingga kepuasan para pemegang saham dapat tercapai. Dilihat dari susunan pemegang saham GIAA, terdapat kepemilikan institusional yang cukup besar dari tahun 2012-2017. Saham institusional dari GIAA dimiliki oleh 3 institusi yaitu PT. Trans Airways, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Total saham institusional dari ke 3 institusi tersebut adalah sebesar 13% dari 100% jumlah saham yang beredar pada tahun 2012 dan di atas 20% dari jumlah saham yang beredar pada tahun 2013 -2017. Berdasarkan penjelasan di atas, diindikasikan bahwa salah satu alasan manajemen GIAA melakukan manajemen laba karena adanya kepemilikan institusional yang cukup besar.

Penelitian yang dilakukan Husaini dan Sayunita (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap perataan laba. Kepemilikan institusional diyakini dapat meminimalisir adanya praktik perataan laba. Selanjutnya, penelitian oleh Ricky (2016) dan Pratiwi dan Damayanthi (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perataan laba yang berarti besar atau kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya praktik perataan laba. Namun, Suryani dan Damayanti (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Artinya, besar atau kecilnya persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar lainnya adalah kepemilikan pemerintah. Teori keagenan menjelaskan bahwa apabila dalam sebuah perusahaan terdapat saham yang dimiliki oleh pemerintah maka semua keputusan yang diambil dalam perusahaan harus dengan persetujuan pemerintah. Hal ini tentunya menyulitkan bagi manajemen untuk bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya kepemilikan pemerintah dalam perusahaan diyakini dapat mengurangi praktik perataan laba. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang saham pengendali harus mengontrol dan mengawasi kinerja dari manajemen, tetapi fakta yang ada bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan politik daripada memikirkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol kepada manajemen sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak baik. Menurut Capalbo *et al* (2018) perusahaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah memiliki intervensi politik yang tinggi.

Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya mengenai PT. Timah Tbk (TINS) dikaitkan dengan teori dari kepemilikan pemerintah. Salah satu alasan TINS melakukan manajemen laba karena adanya upaya manajemen untuk tetap menjaga laba perusahaan agar tidak berfluktuasi sehingga kepuasan para pemegang saham dapat tercapai. Dilihat dari susunan pemegang saham TINS, terdapat kepemilikan pemerintah yang sangat besar dari tahun 2012-2017. Saham pemerintah dari TINS dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Besaran saham pemerintah pada TINS selama tahun 2012-2016 berada pada 65% dari 100% jumlah saham yang beredar. Kecuali pada tahun 2017, seluruh saham pemerintah pada TINS dialihkan kepada PT. Indo Asahan Aluminium (INALUM). Berdasarkan penjelasan di atas, diindikasikan bahwa salah satu alasan manajemen TINS melakukan manajemen laba karena adanya kepemilikan pemerintah yang cukup besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yang *et al* (2012) dan Guo dan Ma (2015) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba ataupun manajemen laba. Hal ini berarti dengan adanya kepemilikan pemerintah dalam perusahaan akan memberikan peluang untuk terjadinya praktik perataan laba. Namun, Niri *et al* (2014), Febrianto (2014), dan Selahudin (2015) tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap manajemen laba. Artinya besar atau kecilnya persentase kepemilikan pemerintah tidak akan mempengaruhi munculnya praktik manajemen laba.

Dari dua jenis struktur kepemilikan yang disebutkan di atas, terdapat satu struktur kepemilikan lagi yang diyakini juga dapat meminimalisir praktik perataan laba yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan. Artinya manajer memiliki peran ganda dalam sebuah perusahaan yaitu sebagai seorang manajer dan sebagai pemegang saham perusahaan (Meilita dan Rokhmawati, 2017). Dalam konsep *corporate governance*, kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan diyakini akan dapat menyatukan

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sehingga konflik yang terjadi menjadi berkurang. Ketika seorang manajer memiliki kepemilikan yang cukup besar maka segala keputusan akan dipilih dengan teliti agar tidak merugikan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya mengenai PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT. Timah Tbk (TINS) dikaitkan dengan teori dari kepemilikan manajerial. Salah satu alasan GIAA dan TINS melakukan manajemen laba karena adanya upaya manajemen untuk tetap menjaga laba perusahaan agar tidak berfluktuasi sehingga kepuasan para pemegang saham dapat tercapai. Dilihat dari susunan pemegang saham GIAA dan TINS, terdapat kepemilikan manajerial dari tahun 2012-2017. Saham manajerial GIAA dan TINS memiliki total yang cukup besar, akan tetapi dimiliki oleh banyak pihak manajemen atau dengan kata lain manajemen hanya memiliki saham manajerial yang kecil. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa saham manajerial belum mampu mencegah terjadinya perataan laba pada GIAA dan TINS.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahariana dan Ramantha (2014) dan Aryanti dan Hendratno (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Hal ini berarti, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan meminimalisir terjadinya praktik perataan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Hasyul *et al* (2017) dan Anggani dan Nazar (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba. Hal ini berarti, besar kecilnya persentase kepemilikan manajerial akan mempengaruhi munculnya praktik manajemen laba. Namun, hasil yang berbeda dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Brilliano *et al* (2016) dan Sugeng dan Faisol (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Artinya bahwa ada atau tidaknya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel-variabel di atas terhadap perataan laba yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, dan juga berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan,

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel tersebut yang terkait pengaruhnya terhadap perataan laba. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PERATAAN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017).”**

1.3. Perumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan dan manajemennya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan berkewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan kepada para pemegang saham. Namun, laporan keuangan yang dilaporkan manajemen seringkali tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak tercapainya target dari perusahaan sehingga memicu manajemen melakukan praktik perataan laba. Dalam konsep *corporate governance*, struktur kepemilikan diyakini dapat meminimalisir terjadinya praktik perataan laba seperti kepemilikan institusional yang dapat memberikan fungsi monitoring terhadap manajemen, kemudian kepemilikan manajerial dapat menjadikan manajemen lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena mereka termasuk pemegang saham perusahaan. Kemudian, kepemilikan pemerintah dapat membatasi pergerakan manajemen sehingga dapat meminimalisir praktik perataan laba. Akan tetapi, pada kenyatannya pemerintah lebih mementingkan kepentingan politik daripada meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perataan laba. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012 – 2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kepemilikan institusional terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017?
 - b. Kepemilikan pemerintah terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017?
 - c. Kepemilikan manajerial terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial terhadap perataan laba secara simultan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kepemilikan institusional terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017.

- b. kepemilikan pemerintah terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017.
- c. kepemilikan manajerial terhadap perataan laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2017.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai praktik perataan laba pada perusahaan BUMN di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan pedoman pustaka untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan, tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan perusahaan tanpa ada tambahan unsur kepentingan perusahaan sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perataan laba. Dalam penelitian ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi perataan laba antara lain adalah kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perataan laba.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *website* resmi Bursa Efek Indonesia (*www.idx.co.id*) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan BUMN. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan yang diperoleh peneliti dari website resmi Bursa Efek Indonesia (*www.idx.co.id*) dan juga website resmi perusahaan yang bersangkutan.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2017.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari beberapa sub-bab. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial) dan variabel independen (perataan laba), definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai variabel independen independen (kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan manajerial) terhadap variabel dependen (perataan laba).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN